

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Secara konseptual administrasi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui usaha kelompok. Sehingga dalam hal ini administrasi merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam usaha kelompok dan menandai setiap usaha pencapaian tujuan secara kolektif. Tidak ada organisasi yang sukses dalam tujuannya tanpa ada dukungan administrasi yang efektif. Dalam konteks yang luas, pencapaian tujuan ekonomi, sosial, politik, militer dan keagamaan dari suatu organisasi sangat tergantung pada administrasi yang efisien. Usaha kelompok bertanggung jawab untuk memajukan masyarakat dan sebaliknya kemajuan masyarakat ditunjang oleh administrasi yang berkelanjutan dan tertib. Administrasi yang efisien secara nyata memberikan andil yang sangat besar bagi suksesnya suatu organisasi dan akhirnya akan mengarah pada kemakmuran masyarakat.

Dalam rangka mendukung proses pemerataan pembangunan masyarakat dan mencapai kemakmuran masyarakat, tidak hanya melihat dalam sisi efisiensi dan efektifitas suatu organisasi. Dalam pelaksanaannya, organisasi-organisasi perusahaan milik negara harus mampu melihat dari prespektif implementasi kebijakan. Dimana didalamnya pasti memerlukan perangkat yang digunakan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan suatu program. Atau dalam arti kata lain, kebijakan publik yang menjadi

acuannya dalam topik pembahasan tentang program kemitraan dan bina lingkungan. Artinya dalam pembahasan nanti landasan dasarnya bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah diwajibkan untuk melaksanakan program pembinaan pada usaha kecil bahkan sebelum disahkannya UU tentang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007. Pembinaan usaha kecil oleh BUMN mulai dilaksanakan sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Pedoman pembinaan usaha kecil tersebut mengalami beberapa kali penyesuaian sampai akhirnya menjadi UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Negara No. 5 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL) yang berlaku hingga saat ini.

Undang - Undang No 19 Tahun 2003 tentang tentang BUMN yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Negara No 5 tahun 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL) merupakan regulasi sebagai dasar bagi perusahaan-perusahaan milik negara. Dimana yang nantinya tidak hanya menunggu tanpa ada inisiatif dan inovasi, dengan menampilkan kerja seadanya, penghematan yang tidak tepat sasaran, yang justru nantinya akan dapat kehilangan peluang bisnis yang menguntungkan. Mengabaikan peran perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial atau bisa disebut dengan

*Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap memboroskan anggaran perusahaan dan mungkin dalam jangka pendek bentuk tanggung jawab perusahaan membengkakkan pengeluaran. Tetapi dalam jangka panjangnya adalah dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dapat meningkatkan produktivitas perusahaan dan menjalin hubungan baik dengan lingkungan masyarakat.

Menurut Laster & Stewart dalam Kusumanegara (2010:108) menyatakan bahwa banyak perdebatan yang muncul tentang persoalan implementasi kebijakan publik yang mengarah pada dua pendekatan yaitu pendekatan *command and control* dan *economic incentive*. Arinya pendekatan *command and control* menyertakan mekanisme yang nampak koersif untuk menyelaraskan pelaksanaan dengan kebijakan acuan misalnya rancangan baku, inspeksi dan pemberian sanksi jika terjadi pelanggaran sedangkan *economic incentive* menggunkan sarana perpajakan, subsidi, atau penalti agar pelaksanaan sesuai dengan kebijakan acuan.

Sehingga secara lebih luas, dalam pelaksanaan PKBL merupakan proses administrasi dari hukum yang didalamnya tercakup keterlibatan berbagai macam aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang dilakukan agar kebijakan yang telah ditetapkan mempunyai akibat, yaitu tercapainya tujuan kebijakan.

Pelaksanaan PKBL diwujudkan dengan upaya-upaya untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Aktivitas PKBL khususnya Perum Jasa Tirta I merupakan wujud nyata dari Program Pemerataan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, dimana pengusaha ekonomi golongan lemah merupakan sasaran utamanya. Menurut Muftie Aries (2007:13)

Idealnya PKBL adalah mewujudkan konsep “*Employment, Income, Growth*” sehingga masyarakat nantinya dapat menabung. Tabungan tersebut dipergunakan untuk 5 (lima) hal menurut Muftie Aries (2007:13) yaitu :

1. *Consumption* (konsumsi sehari-hari),
2. *Capital* (modal usaha),
3. *Social security* (jaminan hari tua),
4. *Social responsibility* (zakat, infak, shadaqah),
5. *Tax* (pajak).

Sehingga dalam pelaksanaan PKBL Perum Jasa Tirta I, memiliki permasalahan antara lain yang dihadapi industri kecil menengah (IKM) atau usaha kecil menengah (UKM) khususnya di Desa Sambi Gedhe Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang. Pertama adalah UKM dan IKM yang memerlukan permodalan untuk pengembangan usaha tetapi secara administrasi tidak memenuhi syarat dan ketentuan sesuai perusahaan. Kedua adalah dalam hal monitoring, supervisi dan pendampingan UKM dan IKM khususnya di Desa Sambi Gedhe Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang. Karena setelah UKM/IKM diberikan modal setelah itu harus benar-benar didampingi dalam bentuk pembinaan dan selalu di monitoring perkembangannya agar dapat berkembang. Melihat permasalahan di atas, cukup relevan jika peraturan yang ada harus benar-benar di terapkan dalam pelaksanaan program PKBL.

Dengan berdasarkan penjelasan di atas, Perum Jasa Tirta I yang merupakan perusahaan BUMN mempunyai kewajiban dalam pemerataan

pembangunan bangsa dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam hal ini menjalankan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan bagaimana pelaksanaannya dalam menjalankan program suatu tanggung jawab moral perusahaan terhadap para stakeholdersnya?. Bertitik tolak dari persoalan inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PERUM JASA TIRTA I DALAM UPAYA PEMERATAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT ( Studi Kasus Desa Sambi Gedhe, Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang )

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Jasa Tirta I dalam upaya pemerataan pembangunan perekonomian masyarakat di Desa Sambi Gedhe, Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Jasa Tirta 1 dalam upaya pemerataan pembangunan di Desa Sambi Gedhe, Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang?

3. Apa saja dampak yang muncul dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Jasa Tirta 1 dalam upaya pemerataan pembangunan di Desa Sambu Gedhe, Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diajukan maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Jasa Tirta I dalam upaya pemerataan pembangunan perekonomian masyarakat di Desa Sambu Gedhe, Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang.
2. Menganalisis dampak yang muncul dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Jasa Tirta 1 dalam upaya pemerataan pembangunan di Desa Sambu Gedhe, Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang.
3. Mengetahui dan memberikan alternatif untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Jasa Tirta I dalam upaya pemerataan pembangunan perekonomian masyarakat di Desa Sambu Gedhe, Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang.

#### D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi :

1. Aspek Teoritis
  - a. Dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada setiap perusahaan-perusahaan milik negara, khususnya dalam menghadapi pembangunan perekonomian negara terutama ekonomi masyarakat, yang dapat tercapai dengan dukungan komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.
  - b. Sebagai bahan wacana dan bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya tentang pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai salah satu strategi keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang CSR dengan mengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil terbaik, tanpa merugikan kelompok masyarakat.
2. Aspek Praktis
  - a. Sebagai bahan masukan bagi perusahaan-perusahaan milik negara dalam usahanya menjadi perusahaan yang mengedepankan prinsip moral dan etis dengan dukungan komitmen perusahaan dalam

pembangunan bangsa dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

- b. Sebagai bahan diskusi bagi akademik, praktisi dan masyarakat luas untuk turut berperan dalam perkembangan perusahaan sebagai bentuk komitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini akan disajikan dalam lima pokok bahasan yang semuanya merupakan satu-kesatuan, di antaranya:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini terdiri dari lima subbab. *Pertama*, akan mendiskripsikan latar belakang. *Kedua*, perumusan masalah penelitian. *Ketiga*, tujuan penelitian. *Keempat*, kontribusi penelitian. *Kelima*, sistematika pembahasan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab II menjelaskan dan mencantumkan teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Yaitu : Teori *Governance*, Konsep *Good Corporate Governance*, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Program Kemitraan BUMN dengan Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah dan Program Bina Lingkungan.



### BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan dan menggambarkan jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi atau situs penelitian, jenis data dan sumber data, teknik yang dipakai pada proses pengumpulan data, analisis data, serta instrument penelitian.

### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian yang terdiri dari dua subbab. Pertama, akan menguraikan gambaran umum tentang Perum Jasa Tirta I Malang terkait tentang tugas pokok dan jenis kegiatan usaha. Kedua, menguraikan hasil dan fokus penelitian mengenai pelaksanaan Pogram Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Jasa Tirta I Malang serta dampak program dalam pemerataan pembangunan perekonomian masyarakat di desa sambi gedhe, kecamatan sumber pucung kabupaten malang. faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Pogram Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Jasa Tirta I Malang di desa sambi gedhe, kecamatan sumber pucung kabupaten malang.

## BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran-saran yang disampaikan oleh peneliti terkait dengan permasalahan yang diangkat.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

